BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Pariaman sangat penting dalam membantu korban kekerasan seksual. P2TP2A memberikan berbagai layanan, mulai dari dukungan medis, psikologis, hingga pendampingan hukum bagi korban. Melalui layanan ini, korban bisa mendapatkan bantuan untuk memulihkan diri dan melanjutkan kehidupan mereka. Keberadaan P2TP2A membantu masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.
2. Kendala-kendala P2TP2A Di antaranya adalah kurangnya Kepercayaan Keluarga terhadap P2TP2A: Kecurigaan keluarga dan kurangnya pemahaman terhadap dukungan yang diberikan menghambat P2TP2A dalam membantu korban dan pelaku. Keluarga sering kali merasa mampu mengatasi situasi tanpa bantuan eksternal, sehingga memengaruhi efektivitas dukungan yang diberikan oleh P2TP2A. Menghadap keluarga yang mendapat intimidasi: P2TP2A menghadapi kesulitan dalam menghadapi pelaku dan keluarga mereka yang menyangkal tindakan kekerasan seksual, yang menyebabkan ancaman terhadap keluarga korban untuk mencabut laporan, sehingga menghambat upaya perlindungan. Kesulitan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Trauma korban sering kali mengakibatkan pernyataan yang tidak konsisten selama laporan polisi,

sehingga menyulitkan P2TP2A untuk mengungkap kebenaran dan memberikan dukungan yang memadai. Kurangnya Sumber Daya Terlatih: P2TP2A kekurangan tenaga profesional terlatih untuk menangani kasus kekerasan seksual secara efisien, sehingga menghambat layanan optimal bagi korban. Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat: Rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual menghambat upaya dukungan P2TP2A. Kendala Anggaran: Anggaran yang terbatas selama proses dukungan membatasi kemampuan P2TP2A untuk memberikan bantuan yang komprehensif kepada korban. Tantangan-tantangan ini menyoroti kompleksitas yang dihadapi oleh P2TP2A dalam memberikan layanan dan dukungan yang efektif kepada korban kekerasan seksual.

3. Upaya-upaya P2TP2A dalam mengatasi kendala dalam menangani korban kekerasan seksual di kota pariaman yaitu mendukung korban kekerasan seksual dan keluarga mereka. Mereka berupaya membangun kepercayaan dengan keluarga korban dengan menjelaskan bagaimana mereka akan membimbing dan melindungi korban selama proses hukum berlangsung. Memberikan informasi yang jelas tentang prosedur, proses hukum, dan layanan yang tersedia sangat penting untuk meyakinkan keluarga dan mendapatkan kepercayaan mereka dalam mempercayakan orang yang mereka cintai kepada P2TP2A. Lembaga ini juga membantu keluarga yang menghadapi intimidasi, membantu mereka memahami situasi dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan reaksi keras dari masyarakat. P2TP2A bekerja sama dengan psikolog untuk membimbing korban melalui pemberian pernyataan yang akurat dan penyembuhan dari trauma selama

proses hukum. Untuk memperkuat kemampuan mereka, P2TP2A mengadakan pelatihan tentang penanganan trauma dan bantuan hukum untuk memastikan para staf menangani kasus kekerasan seksual secara efektif. Selain itu, P2TP2A mengadakan penyuluhan antikekerasan di sekolah dan masyarakat untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi korban. P2TP2A bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun tempat penampungan yang aman bagi korban, menyediakan layanan dukungan medis, psikologis, dan sosial untuk pemulihan fisik dan mental mereka. Mereka juga mengelola anggaran dari sumbangan sukarelawan, dan kontribusi pribadi untuk memastikan sumber daya yang cukup untuk kebutuhan para korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang sangat berpengaruh dalam membimbing dan mendampingi korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan sebaiknya lebih mengoptimalkan peranannya dengan memenuhi kebutuhan korban dengan sebaik-baiknya.
2. Penulis menyarankan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) untuk lebih gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

3. Adapun saran penulis untuk Pemda sebaiknya lebih memperhatikan lagi lembaga P2TP2A dengan menyediakan sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan P2TP2A karena lembaga ini sangat berguna dalam masyarakat untuk membimbing dan melindungi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditam, Bandung.
- Bambang Suggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H, 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari DKK, 2022, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mardalis , 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara Jakarta.
- Profil Pariwisata Kota Pariaman, 2006, *Tourist Guide Book*, Pemerintah Kota Pariaman.
- R. sutyo Bakir, 2009, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Soerjono Soekanto,2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta.

B. Peraturan Perundang –undangan

- Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

Keputusan Walikota Pariaman Nomor 281/463/2019 Tentang Pembentukan Pengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pariaman periode 2019-2024.

C. Sumber Lain

AF themes, “*tugas pokok dan fungsi*“, (<https://dspppa.belitung.go.id/>), diakses pada 23 oktober 2023, 10.51

Doni setyobudi okananto, *hubungan antara sikap terhadap penampinlan fisikwanita dengan kecendrungan pelecehan seksual pada pengguna angkutan kota*, (Surabaya: univ 17 agus, 2013)

<http://dinsospmpa.sekadaukab.go.id/>, diakses pada 24 oktober 2023, 09.48.

<https://upt-lbk.unj.ac.id/courses-41-lesson/363>, diakses pada 7 november 2023, 23.22.

Jamhuri, J., & Rafiah, R. (2019). Upaya Meminimalisir Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1),

Mutia Ariesca Suwandi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tunagrahita Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam System Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UMY, 2017.

Padek jawa pos, <https://padek.jawapos.com/utama/30/12/2022/nyaris-satu-kasus-per-hari-pelecehan-seksual-di-sumbar-anak-anak-jadi-korban/>, diakses pada 22 oktober 2023, 19.43

Pius Pandor DKK, 2023, *Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus (Realasi Aku Dan Liyan)*, Jurnal Filsafat Indonesia vol.6 no. 1.

Portal pemerintahan kota pariaman, <https://pariamankota.go.id/profil/kategori?id>, diakses pada 6 November 2023, 15.37

Pusat penguatan karakter, “Apa itu kekerasan seksual “, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada 23 oktober 2023, 14.15

Rahmiyanto dan Waliadin, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan Legislati Indonesia Vol 15 No.4 - Desember 2018.*

Susi wiji utami, *hubungan antara control diri dengan pelecehan seksual pada remaja di unit kegiatan olahraga universitas muhammadiyah purwokerto*, (purwokerto: ump, 2016).

Tohari, 2022, Tanggung Jawab Yuridis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Melakukan pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4 (2).